

Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat dan Bentuk Kerusakan Pesisir Distrik Sorong Barat Kota Sorong

Community Socio-Economic Characteristics and Forms of Coastal Damage West Sorong District Sorong City

Oleh:

Azis Maruapey^{1*}, Fajrianto Saeni², Lona H. Nanlohy³

^{1,2,3}Program Studi Kehutanan UM Sorong

e-mail correspondence: azis.maruapey74@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik sosial ekonomi masyarakat dan bentuk kerusakan wilayah pesisir di Distrik Sorong Barat. Penelitian ini dilaksanakan selama Bulan Agustus 2022, dengan menggunakan metode deskriptif dengan teknik survey dan observasi (dengan melakukan pengamatan di lapangan) serta wawancara bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi masyarakat wilayah pesisir Distrik Sorong Barat yang meliputi umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, dan pendapatan sangat menentukan bentuk dan intensitas kegiatan pemanfaatan dan pengrusakan wilayah pesisir. Bentuk dan Intensitas Kerusakan (IK) dari setiap bentuk aktivitas kerusakan pada wilayah pesisir Distrik Sorong Barat akibat aktivitas pembukaan pemukiman baru dengan Intensitas Kerusakan (IK) sebesar 28,46 % kategori kerusakan sedang, kerusakan akibat kegiatan reklamasi pantai IK 18,46 % kategori ringan, kerusakan akibat kegiatan pengambilan sirtu dan mangrove IK 3,08 % kategori ringan, akibat penebangan vegetasi pantai IK 4,61 % kategori ringan, lokasi pembuangan sampah IK 1,54 % kategori ringan dan aktifitas berkebun IK 10,00 % kategori ringan. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan yakni a) memberikan penerangan; b) meminimalkan pembukaan lahan pemukiman, pengerukan pasir dan batu serta kegiatan reklamasi pantai; c) pengembangan kewirausahaan masyarakat melalui sistem kelola kemitraan dengan kelompok masyarakat yang mampu melakukan pengelolaan ekosistem pesisir pantai sebagai kawasan pariwisata (objek wisata) tanpa mengubah fungsi utamanya.

Kata kunci : Sosial Ekonomi Masyarakat, Bentuk Kerusakan Pesisir

Abstract

This study aims to describe the socio-economic characteristics of the community and the forms of damage to coastal areas in West Sorong District. This research was carried out during August 2022, using a descriptive method with survey and observation techniques (by making observations in the field) as well as free interviews. The results showed that the socio-economic factors of the people of the coastal area of West Sorong District which included age, level of education, number of family dependents, and income greatly determined the form and intensity of the utilization and destruction of coastal areas. Form and Intensity of Damage (IK) of each form of damage activity to the coastal areas of West Sorong District due to the opening of new settlements with the Intensity of Damage (IK) of 28.46% moderate damage category, damage due to beach reclamation activities IK 18.46% light category, damage due to extracting sirtu and mangrove IK 3.08% light category, due to logging IK coastal vegetation 4.61% light category, location of garbage disposal IK 1.54% light category and gardening activities IK 10.00% light category. Control efforts that can be carried out are a) providing information; b) minimize land clearing for settlements, dredging of sand and stones and beach reclamation activities; c) developing community entrepreneurship through a partnership management system with community groups capable of managing coastal ecosystems as tourism areas (tourism objects) without changing their main function.

Keywords: Socio-Economic Society, Forms of Coastal Damage

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir secara sederhana dapat dipandang sebagai wilayah yang berbatasan dengan laut dan daratan. Menurut (Setyawan *et al.*, 2015), kawasan pesisir adalah daerah peralihan atau tempat pertemuan antara daratan dan laut, yang mencakup lingkungan tepi pantai dan perairan pantai. Menurut (La Sara, 2014), menjelaskan, bahwa secara ekologi wilayah pesisir merupakan *ecotone* mewakili transisi dari daratan ke pengaruh-pengaruh dari laut. Wilayah pesisir juga merupakan daerah yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan maupun kondisi iklim yang tidak menentu. Ekosistem pesisir umumnya merupakan ekosistem yang mempunyai peran penting terhadap faktor penyangga kehidupan bagi berbagai jenis organisme maupun tumbuhan yang hidup di sekitar ekosistem tersebut.

Kemudahan akses terhadap kawasan pesisir cenderung meningkatkan laju pemanfaatan wilayah pesisir di tahun-tahun mendatang, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya ekonomi maupun pemanfaatan ruang. Selain itu, hal lain yang tidak boleh diabaikan adalah fakta yang menunjukkan bahwa tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia bermukim di kawasan pesisir (DKP, 2002). Menurut (Fatmasari, 2016), mengatakan bahwa masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dalam arti sempit, masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan.

Distrik Sorong Barat memiliki luas 140.4 Km², dimana luas areal penelitian di Kelurahan Rufei dan Klawasi yang berhubungan dengan wilayah pesisir seluas 69,70 Km² atau sekitar 49,64 % dari luas distrik. Jumlah penduduk Distrik Sorong Barat berjumlah 38.324 jiwa, dan jumlah penduduk kelurahan Rufei dan Klawasi berjumlah 23.969 jiwa dan sebagian besar tinggal di wilayah pesisir (Distrik Sorong Barat dalam Angka, 2022).

Sosial ekonomi masyarakat pesisir di wilayah Distrik Sorong Barat terbentuk mengikuti kedinamisan sumberdaya pesisir dan laut sekitarnya, potensi sumberdaya dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan keseharian. Tidak dapat dipungkiri profesi nelayan tergolong memiliki resiko usaha yang tinggi, menyebabkan masyarakatnya hidup dalam suasana alam keras, penuh tantangan juga ketidakpastian. Dinamika sosial dan ekonomi yang berlangsung pada masyarakat pesisir Sorong Barat semakin rumit saat diperhadapkan dengan situasi yang sulit jika terjadi kerusakan ekosistem, bencana alam maupun konflik sosial. Aktivitas ekonomi dan non-ekonomi masyarakat pesisir Distrik Sorong barat memberikan dampak terhadap ekosistem pesisir. Dampak yang paling nyata di kawasan pesisir dengan eksploitasi sumberdaya adalah degradasi kondisi bio-fisik sumberdaya pesisir.

Berbagai aktifitas sosial ekonomi masyarakat tentunya memberikan dampak yang tidak diharapkan dari kondisi biofisik wilayah pesisir yang dikenal sangat rentan terhadap perubahan. Adapun tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir Distrik Sorong Barat Kota Sorong; bentuk dan tingkat kerusakan wilayah pesisir akibat dari aktivitas masyarakat; dan menentukan upaya pengelolaannya.

METODE

Penelitian dilaksanakan pada ekosistem pesisir Distrik Sorong Barat, Kota Sorong Papua Barat Daya, yakni pesisir Kelurahan Rufei dan Klawasi dan berlangsung selama bulan Agustus 2022.



Sumber : Kota Sorong dalam Angka 2017; www.sorongkota.go.id/
[@pemkotsorong] sorongkota.bps.go.id

Gambar 1. Pemetaan Lokasi Penelitian

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: peta lokasi, kamera, *roll meter*, *tally sheet*, dan alat tulis-menulis. Bahan yang menjadi objek penelitian ini adalah kerusakan- kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir Distrik Sorong Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik survey dan observasi (dengan melakukan pengamatan di lapangan) dan teknik wawancara bebas. Obyek penelitian ini adalah bentuk-bentuk kerusakan sebagai akibat dari aktivitas masyarakat dan pemerintah yang menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem di wilayah pesisir Distrik Sorong Barat.

Penentuan responden ditentukan secara *purposive* dengan melakukan pendataan Kepala Keluarga (KK) pada masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir Distrik Sorong Barat.

Agar tujuan penelitian dapat tercapai maka dalam pengolahan dan analisis data dilakukan meliputi :

- a. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir
- b. Bentuk-bentuk kerusakan pesisir.
- c. Selanjutnya dilakukan penentuan Intensitas Kerusakan (IK) berdasarkan rumus Kusmana & Onrizal (1998) :

$$IK (\%) = \frac{\text{Luas area setiap bentuk kerusakan}}{\text{Luas ekosistem pesisir pantai Distrik Sorong Barat}} \times 100 \%$$

Penetapan kriteria kategori kerusakan berdasarkan Intensitas Kerusakan (IK) sebagai berikut:

- Rusak ringan ($IK < 25\%$)
- Rusak sedang ($25\% \geq IK \leq 50\%$)
- Rusak berat ($50\% \geq IK \leq 75\%$)
- Rusak sangat parah ($IK \geq 75\%$)

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif, dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar (foto).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Distrik Sorong Barat

1. Karakteristik Sosial Masyarakat Pesisir

Karakteristik sosial masyarakat pesisir Distrik Sorong Barat, Kota Sorong dapat dilihat dari umur, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, lama domisili, status kepemilikan rumah dan jenis bangunan.

1) Umur

Responden di Distrik Sorong Barat yang tergolong usia produktif sebanyak 27,50% yang berumur 20-34 tahun, sedangkan yang berusia 35-54 tahun sebanyak 42,50% dan 30% responden berusia lebih dari 55 tahun. Menurut (Dilla *et al.*, 2017; Lolowang *et al.*, 2022), umur mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja pada jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga fisik.

2) Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah anggota keluarga 35% keluarga beranggotakan 1-4 orang, 42,50% keluarga beranggotakan 5-6 orang, dan 22,50% beranggotakan ≥ 7 orang. Hal ini sejalan dengan penelitian (Yudo dan Hernaningsih, 2006), masyarakat pesisir mempunyai anak kurang dari tiga orang yang berarti anggota keluarganya sebagian besar terdiri dari 3-4 anggota keluarga. Menurut (Fatmasari, 2016), kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga rumah tangga merupakan salah satu dari strategi adaptasi yang harus ditempuh untuk menjaga kelangsungan hidup mereka.

3) Tingkat Pendidikan

Responden yang tidak sekolah dan hanya berpendidikan sampai Sekolah Dasar (SD) adalah 48%, sebanyak 67,50%, berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), sebanyak 32,50%. Menurut (Yunita *et al.*, 2018; Pelu & Christianty, 2022), nelayan atau masyarakat pesisir menganggap pendidikan tidak memiliki peran yang penting bagi profesi mereka. Keseluruhan proses tersebut memiliki arti penting dan menentukan, karena sementara tatanan lama dipertahankan, tatanan baru yang terkadang berbeda sama sekali mulai muncul (Kurniawan, 2016; Lolowang *et al.*, 2022).

4) Lama Domisili

Hasil penelitian 25 % responden telah berdomisili selama 10-20 tahun, sebagian besar responden telah berdomisili selama 21-30 tahun yaitu sebanyak 40 % dan sebanyak 35 % telah berdomisili lebih dari 31 tahun, lainnya sebanyak 8% (Lainnya ini adalah responden yang sudah lupa lama domisili karena faktor usia).

5) Status Kepemilikan Rumah

Kondisi fisik bangunan atau rumah masyarakat pesisir Distrik Sorong Barat, diketahui ada tiga jenis status kepemilikan rumah masyarakat pesisir, milik sendiri, sewa dan menumpang di keluarganya. Terdapat empat jenis bangunan rumah yaitu permanen, semi permanen, kayu/papan, dan gubuk. Sebanyak 75% responden memiliki rumah sendiri, 15% menyewa rumah untuk tinggal dan 10 % lainnya tinggal menumpang di rumah keluarga inti. Sosial ekonomi responden kita bisa lihat dari jenis bangunan rumahnya dan status kepemilikan.

2. Karakteristik Ekonomi Masyarakat Pesisir

1) Modal

Modal dapat bersumber darimanapun baik dipinjam maupun modal sendiri. Sebagian besar responden yaitu 80% mengolah usahanya menggunakan modal sendiri dan 20% menggunakan modal pinjaman untuk menjalankan usahanya.

2) Pendapatan

Pendapatan bulanan responden mulai pendapatan bulanan 1.000.000 – 1.999.000, pendapatan 2.000.000 – 2.999.000, pendapatan 3.000.000 – 3.999.999 dan pendapatan 4.000.000-4.500.000. Tingkat pendapatan responden di pesisir Distrik Sorong Barat termasuk sudah sangat baik. Kondisi pendapatan responden tergantung dari jenis pekerjaan yang digeluti (Pinto, 2015). Penjelasan (Muflikhati *et al.*, 2010), pendapatan nelayan sangat tergantung pada banyaknya hasil tangkapan ikan yang sangat berfluktuasi sesuai dengan musim. Untuk sekarang nelayan sudah lebih pandai karena mereka sudah mempunyai pekerjaan sampingan.

3) Pemasaran

Berdasarkan data penelitian, 70% responden menjual hasil tangkapannya kepada penampung dan 30% menjual hasil tangkapannya ke pasar. Jika hasil tangkapan dalam jumlah sedikit, pada umumnya responden menjual hasil tangkapannya kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal responden. Sebaliknya, jika hasil tangkapan dalam jumlah yang cukup banyak, responden lebih memilih menjualnya ke pengumpul atau tibo-tibo karena lebih efektif dan efisien. Menurut (Nuriati, 2019), ketika nelayan memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah banyak, biasanya nelayan menjual ke pemborong atau pengecer kemudian ke konsumen akhir.

4) Upah Harian

Upah pendapatan harian dari aktifitas nelayan, tani, buruh dan lainnya mulai dari kisaran Rp.150.000 hingga Rp.300.000. Upah harian dari responden ini sudah sangat baik. Karena pendapatannya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

B. Bentuk Kerusakan Pesisir di Distrik Sorong Barat Kota Sorong

Masyarakat pesisir Distrik Sorong Barat, dalam penelitian ini memiliki pola kehidupan dan sistem pengetahuan masyarakat tentang berbagai pemanfaatan sumberdaya pesisir telah lama berlangsung. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dalam penelitian ini diketahui

bahwa sebagian masyarakatnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan pesisir disekitar tempat hidup mereka, dimana intensitas dan frekuensi interaksi serta mereka dalam memanfaatkan berbagai sumberdaya pesisir sebagai sumber sosial ekonomi keluarga, dimana pemanfaatan sumberdaya alam yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah dengan keberadaan ekosistem pesisir yang cukup tersedia. Faktor lain yang diduga berhubungan erat dengan pemanfaatan sumberdaya alam ekosistem pesisir oleh masyarakat adalah kebiasaan yang telah tertanam sejak lama mereka dan telah melembaga di kalangan masyarakat setempat. Adapun kegiatan masyarakat yang digali selama penelitian ini meliputi pemanfaatan berbagai sumberdaya alam bagi sebuah keluarga, dimana hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden menjadikan wilayah pesisir Distrik Sorong Barat meliputi kegiatan pemanfaatan lahan untuk pemukiman, mengambil pasir dan batu (*sirtu*), berkebun, mengambil kayu bakar dari pohon bakau dan kegiatan lain-lain sebagai tumpuan ekonomi keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Intensitas Kerusakan (IK) pada wilayah pesisir Distrik Sorong Barat Kota Sorong, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai analisis intensitas kerusakan wilayah pesisir yang dikonversi dengan total luas wilayah pesisir Distrik Sorong Barat (2,6 km x 50 m = 13 ha)

Bentuk Aktivitas Kerusakan	Luas Kerusakan (Ha)	Persen Kerusakan (%)	Intensitas Kerusakan (%)	Kategori Kerusakan
Pemukiman	3,7	43,02	28,46	Sedang
Reklamasi pantai	2,4	27,91	18,46	Ringan
Pengambilan sirtu & mangrove	0,4	4,65	3,08	Ringan
Penebangan vegetasi pantai	0,6	6,98	4,61	Ringan
Pembuangan sampah	0,2	2,32	1,54	Ringan
Berkebun	1,3	15,12	10,00	Ringan
Total	8,6	100	-	-
Total Luas Pesisir	-	-	13	-

(Sumber : Analisis data primer, 2022)

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 1, menunjukkan bahwa bentuk aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem pesisir berupa kegiatan pengembangan pemukiman, reklamasi pantai, berkebun, pengambilan kayu mangrove, pengambilan pasir dan batu serta sebagai tempat pembuangan akhir sampah rumah tangga. Dari hasil pengukuran dilapangan bahwa total luas kerusakan ekosistem pesisir akibat dari aktivitas masyarakat berupa berkebun, pengambilan kayu mangrove, pengambilan pasir dan batu (*sirtu*) serta tempat pebuangan akhir sampah seluas 8,6 ha. Hasil analisis Intensitas Kerusakan (IK) dari setiap bentuk kaktivitas kerusakan eksostem pesisir pantai Distrik Sorong Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Dari hasil analisis Intensitas Kerusakan (IK) dari setiap bentuk aktivitas kerusakan pada wilayah pesisir Distrik Sorong Barat akibat aktivitas pembukaan pemukiman baru dengan Intensitas Kerusakan (IK) sebesar 28,46 % kategori kerusakan sedang, kerusakan akibat kegiatan reklamasi pantai IK 18,46 % kategori ringan, kerusakan akibat kegiatan pengambilan sirtu dan mangrove IK 3,08 % kategori ringan, akibat penebangan vegetasi pantai IK 4,61 % kategori ringan, lokasi pembuangan sampah IK 1,54 % kategori ringan dan aktifitas berkebun IK 10,00 % kategori ringan.

Berdasarkan kriteria kategori tingkat kerusakan, maka tingkat kerusakan pesisir di Distrik Sorong Barat rata-rata masih dalam kategori ringan, namun kedepan tingkat kerusakan bukan makin berkurang namun justru harus dikhawatirkan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah populasi manusia, oleh karena itu perlu diwaspadai bentuk pemanfaatannya disertai pertimbangan kemungkinan pengendaliannya karena pada seluruh wilayah Distrik Sorong Barat terus berkembang. Berbagai bentuk kerusakan diatas ini disebabkan oleh berbagai kegiatan aktivitas masyarakat setempat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pesisir dapat dilihat pada gambar 2 – 5 berikut ini.



(a)

(b)

(Sumber: Data primer, 2022)

Gambar 2. (a) Reklamasi pantai dan (b) Pemukiman masyarakat



(a)

(b)

(Sumber: Data primer, 2022)

Gambar 3. (a) & (b) Penebangan hutan mangrove



(a)

(b)

(Sumber: Data primer, 2022)

Gambar 4. (a) & (b) Penebangan vegetasi pantai



(a)

(b)

(Sumber: Data primer, 2022)

Gambar 5. (a) & (b) Bentuk Aktivitas Penggalian Pasir dan Batu

Adapun faktor-faktor yang mendorong aktivitas masyarakat di wilayah pesisir Distrik Sorong Barat untuk memanfaatkan ekosistem pesisir dalam rangka mencukupi kebutuhannya sehingga berakibat rusaknya ekosistem pesisir antara lain :

1. Keinginan untuk mengambil atau merambah kawasan akan kayu mangrove dengan harapan nilai ekonomis untuk dijual dan menguntungkan.
2. Kebutuhan kayu bakar (kayu energi) yang sangat mendesak untuk rumah tangga, karena tidak ada pohon lain di sekitarnya yang bisa ditebang.
3. Adanya hasrat untuk menkonversi lahan pesisir untuk dijadikan tempat tinggal.
4. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan berbagai fungsi hakiki dari pada ekosistem pesisir.

C. Upaya Pengelolaan dan Pelestarian Kerusakan Wilayah Pesisir Distrik Sorong Barat

Permasalahan utama tentang pengaruh dan tekanan terhadap ekosistem pesisir Distrik Sorong Barat bersumber dari keinginan masyarakat untuk mengkonversi areal ekosistem pesisir pantai menjadi areal perkampungan, kebun, pengambilan pasir dan batu serta kegiatan lainnya. Selain itu juga meningkatnya permintaan terhadap produksi kayu menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap hutan mangrove di sepanjang wilayah pesisir. Perlindungan dan pelestarian perlu dipertimbangkan ketika suatu sistem telah berubah dalam tingkat tertentu sehingga tidak dapat lagi memperbaiki atau memperbaharui diri secara alami. Dengan demikian wilayah pesisir yang kaya akan vegetasi pantai terutama mangrove dan vegetasi non mangrove yang berfungsi sebagai perlindungan sosial ekonomi dan fisik bagi masyarakat pesisir di Distrik Sorong Barat.

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir Distrik Sorong Barat

Pengelolaan wilayah pesisir di Distrik Sorong Barat mestinya didasarkan atas tiga aspek masalah. Masalah tersebut adalah aspek ekologi dan sosial ekonomi, kelembagaan dan perangkat hukum, serta strategi dan pelaksanaan rencana.

a. Aspek Ekologi dan Sosial Ekonomi

Adanya sifat *open acces* pada wilayah pesisir Distrik Sorong Barat maka kalau "mungkin" diperlukan upaya penataan zona pemanfaatan di sepanjang pesisir. Upaya tersebut dimaksudkan sebagai upaya meminimalkan kerusakan dan sekaligus melestarikan fungsi ekologis dan ekonomis wilayah pesisir. Penataan zona pemanfaatan disini adalah pembagaian kawasan ekosistem pesisir menjadi zona pemanfaatan dan zona perlindungan atau pelestarian.

Aspek ekologi meliputi dampak ekologis intervensi manusia terhadap ekosistem pesisir. Berbagai dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem pesisir pantai harus

diidentifikasi, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi di kemudian hari. Adapun aspek sosial ekonomi mencakup aspek kebiasaan masyarakat (terutama masyarakat pesisir) dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir. Begitu pula kegiatan pengambilan pasir dan batu, penebangan dan perusakan vegetasi mangrove, pembuangan akhir sampah, dan sebagainya di sepanjang ekosistem pesisir harus diidentifikasi dengan baik.

b. Aspek Kelembagaan dan Perangkat Hukum

Selain lembaga-lembaga adat, pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Sorong maupun lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan wilayah pesisir merupakan lembaga-lembaga yang sangat berkompeten dalam pengelolaan dan pelestarian seluruh pesisir Distrik Sorong Barat. Koordinasi antar instansi dan lembaga yang terkait dengan pengelolaan dan pelestarian wilayah pesisir adalah hal mendesak untuk dilakukan saat ini. Mengingat kepentingan strategis dan kompleksnya permasalahan wilayah pesisir di seluruh wilayah Kota Sorong, maka perlu kelembagaan yang jelas yang diberi kewenangan untuk menangani kawasan tersebut secara menyeluruh. Jika selama ini pengelolaan kawasan pesisir diserahkan kepada salah satu lembaga saja, maka sekarang ini diperlukan sinergitas dari berbagai lembaga untuk menangani kawasan ekosistem pesisir secara terpadu (*integrated*). Dengan demikian upaya kearah kelestarian pesisir dapat berjalan dengan baik.

Aspek perangkat hukum adalah peraturan dan undang-undang yang terkait dengan pengelolaan dan pelestarian wilayah pesisir. Sudah cukup banyak undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan instansi-instansi yang terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir. Yang diperlukan sekarang ini adalah penegakan hukum sebenar-benarnya atas pelanggaran terhadap perangkat hukum tersebut.

2. Pengelolaan wilayah Pesisir Distrik Sorong Barat

Dalam kerangka pengelolaan dan pelestarian wilayah pesisir Distrik Sorong Barat, terdapat dua konsep utama yang dapat diterapkan. Kedua konsep tersebut pada dasarnya memberikan legitimasi dan pengertian bahwa pesisir Distrik Sorong Barat sangat memerlukan pengelolaan dan perlindungan agar dapat tetap lestari. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap keberadaan pesisir Distrik Sorong Barat sebagai bentuk sabuk hijau di sepanjang pesisir pantai.

Perlu diingat di sini bahwa wilayah pesisir Distrik Sorong Barat selain terdapat terdapat areal/lahan yang bukan kawasan hutan, biasanya status hutan ini dikelola oleh masyarakat (pemilik lahan) yang dipergunakan untuk kebun kelapa dan lain-lain dan sebagainya. Oleh

karena itu sekarang ini perlu dikembangkan suatu pola pengawasan pengelolaan pesisir partisipatif yang melibatkan masyarakat. Ide ini dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa masyarakat sekitar wilayah Distrik Sorong Barat yang relatif miskin harus dilibatkan dalam pengelolaannya dengan cara diberdayakan sosial ekonominya.

Dengan demikian ada beberapa upaya yang dilakukan untuk melindungi wilayah pesisir Distrik Sorong Barat adalah sebagai berikut :

1. Menghindari kegiatan penebangan terhadap vegetasi mangrove maupun vegetasi pantai dalam jumlah berlebih dan mengupayakan pemahaman kepada masyarakat terhadap dampak negatif yang akan timbul jika merusak wilayah pesisir
2. Konversi wilayah pesisir menjadi lahan pemukiman, pengerukan pasir dan batu maupun kegiatan reklamasi pantai harus di minimalkan, jika perlu dihindari dengan jalan monitoring pemerintah, dan aparat kelurahan dan pihak-pihak terkait dalam bentuk penetapan perundang-undangan untuk hal tersebut, sehingga masyarakat tidak dengan bebasnya mengubah lanscape kawasan pesisir.
3. Pengembangan kewirausahaan masyarakat melalui sistim kelola kemitraan sebagai wujud upaya terpadu yang melibatkan berbagai pihak untuk membentuk suatu kelompok masyarakat yang mampu melakukan pengelolaan wilayah pesisir sebagai kawasan pariwisata (objek wisata) untuk kesejahteraan masyarakat setempat tanpa mengubah fungsi utamanya.

Berikut aspek dan sub aspek permasalahan dan alternatif pemecahan terhadap keberadaan wilayah pesisir Distrik Sorong Barat dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Aspek dan sub aspek permasalahan dan alternatif pemecahan terhadap keberadaan wilayah pesisir Distrik Sorong Barat

No.	Aspek Permasalahan	Sub Aspek Permasalahan	Alternatif Pemecahan masalah
1.	Aspek Sosial Budaya	Rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat ekosistem wilayah pesisir	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Ekosistem Pesisir sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat pesisir
		Rendahnya partisipasi masyarakat	Melibatkan msyarakat dalam setiap kegiatan pelestarian dan pengelolaan ekosistem pesisir pantai
		Adanya perkampungan di sepanjang pesisir pantai	1. Pemberdayaan masyarakat pesisir (<i>community empowerment</i>) 2. Pembinaan dan penerangan tentang pentingnya kawasan mangrove
		Tumpang tindih penggunaan kawasan seperti reklamasi	Perlu konstruksi tata batas pesisir yang jelas dilapangan

	pemukiman, kebun, pengambilan pasir dan batu maupun pemanfaatan lain.	
	Pemanfaatan pesisir untuk area eksploitasi pasir dan batu maupun reklamasi	1. Larangan pemanfaatan pesisir yang berlebihan 2. Perlindungan pesisir pantai
2. Aspek Biologi	Penebangan (Perusakan) vegetasi pesisir pantai	1. Pemasangan tanda larangan menebang di sepanjang kawasan ekosistem pesisir pantai 2. Perlu pembinaan dan penyuluhan tentang pentingnya kawasan pesisir pantai bagi masyarakat di sekitar kawasan 3. Penindakan secara tegas dan pemberlakuan hukum yang berlaku untuk mengatasi kegiatan tersebut.
	Pemukiman dan perumahan penduduk	1. Relokasi masyarakat jauh dari kawasan bila memungkinkan 2. Perlu pembinaan dan penyuluhan tentang pentingnya kawasan pesisir pantai
	Pemanfaatan ekosistem pesisir oleh masyarakat di sepanjang pesisir pantai	Meminimalisasi adanya kegiatan pemanfaatan berlebihan oleh masyarakat pesisir kawasan
	Abrasi pantai	1. Pemasangan tanda larangan menebang di dalam dan di luar kawasan mangrove 2. Perlu rehabilitasi vegetasi yang telah rusak

(Sumber : Analisis Data primer, 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Karakteristik sosial masyarakat pesisir Distrik Sorong Barat yang meliputi umur, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, lama domisili, dan status kepemilikan rumah. Karakteristik ekonomi masyarakat pesisir meliputi modal, pendapatan, pemasaran dan upah harian sangat menentukan bentuk dan intensitas kegiatan pemanfaatan dan pengrusakan ekosistem pesisir pantai. Bentuk-bentuk kerusakan ekosistem pesisir yang timbul akibat dari aktivitas masyarakat pesisir Distrik Sorong Barat dalam pemanfaatan ekosistem pesisir berupa kegiatan berkebun, pengambilan kayu mangrove, pengambilan pasir dan batu, reklamasi pantai serta sebagai tempat pembuangan akhir sampah rumah tangga.

Intensitas Kerusakan (IK) dari setiap bentuk aktivitas kerusakan pada wilayah pesisir Distrik Sorong Barat akibat aktivitas pembukaan pemukiman baru dengan Intensitas Kerusakan (IK) sebesar 28,46 % kategori kerusakan sedang, kerusakan akibat kegiatan reklamasi pantai IK 18,46 % kategori ringan, kerusakan akibat kegiatan pengambilan sirtu dan

mangrove IK 3,08 % kategori ringan, akibat penebangan vegetasi pantai IK 4,61 % kategori ringan, lokasi pembuangan sampah IK 1,54 % kategori ringan dan akktivitas berkebun IK 10,00 % kategori ringan.

Upaya pengendalian yang dapat dilakukan dalam mengendalikan laju kerusakan pesisir Distrik Sorong Barat antara lain a) memberikan penerangan tentang manfaat dari pada hutan mangrove; b) meminimalkan kegiatan pembukaan lahan pemukiman masyarakat, pengerukan pasir dan baru serta kegiatan reklamasi pantai; c) pengembangan kewirausahaan masyarakat melalui sistim kelola kemitraan dengan kelompok masyarakat yang mampu melakukan pengelolaan pesisir sebagai kawasan pariwisata (objek wisata) untuk kesejahteraan masyarakat setempat tanpa mengubah fungsi utamanya.

Saran

Sebagai upaya perlindungan dan pelestarian ekosistem pesisir Distrik Sorong Barat, untuk itu dapat disarankan perlu dilakukan upaya perlindungan dan rehabilitasi kawasan tersebut yang merupakan penyangga bagi kehidupan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2002. Pedoman Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Ditjend. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP Jakarta.
- Distrik Sorong Barat dalam Angka, 2022
- Fatmasari, D., 2016. Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabu-paten Cirebon. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 6(1). DOI: [10.24235/amwal.v6i1.255](https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/255). <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/255> (Diakses 24 Oktober 2022)
- Pelu, F., & Christianty, R., 2022. Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Islam Pesisir (Studi pada Masyarakat Nelayan Pesisir di Sekitar Tempat Wisata Negeri Morella Kecamatan Leihitu). *Jurnal Mediasi* Vol. 1, No. 1, Juni 2022, Hal. 31 – 43. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/MDS/article/view/3431/0> (Diakses 13 Novemver 2022)
- Kusmana, C dan Onrizal., 1998. Evaluasi Kerusakan Kawasan Mangrove dan Arah Teknik Rehabilitasi di Pulau Jawa. Lokakarya Jaringan Kerja Pelestarian Mangrove Pemalang, Jawa Tengah. 12-13 Agustus 1998.
- Kota Sorong dalam Angka 2017; www.sorongkota.go.id/ [[@pemkotsorong](mailto:pemkotsorong@sorongkota.bps.go.id)]sorongkota.bps.go.id
- La Sara, 2014. Pengelolaan Wilayah Pesisir (Gagasan memelihara Aset Wilayah Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa). Penerbit Alfabeta Bandung.
- Lolowang, J., Pangemanan, I. R. J., & Memah, M. Y., 2022. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. *AGRIRUD*

- Volume 3 Nomor 4, Januari 2022: 541-547.
[file:///C:/Users/sony/Downloads/eruauw,+12OKT-02+Jebrindah+Lolowang+\(OK\)%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/sony/Downloads/eruauw,+12OKT-02+Jebrindah+Lolowang+(OK)%20(1).pdf) (Diakses 12 Oktober 2022)
- Muflikhati, I., Hartoyo, Sumarwan, U., Fahrudin, A., & Puspitawati, H., 2010. Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga: Kasus di Wilayah Pesisir Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Kel & Kons.* Vol 3 No.1. Januari. Hlm 1-10. DOI: <https://doi.org/10.24156/jikk.2010.3.1.1> <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/5178> (Diakses 24 Oktober 2022)
- Nuriati, N. K., 2019. Analisis Efisiensi Saluran Pemasaran Ikan Tongkol Hasil Tangkapan Nelayan Di Desa Seraya Timur Kecamatan Karangasem. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 10(2), 512-522. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/20096> (Diakses 24 Oktober 2022)
- Pinto, Z., 2015. Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY). *JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN P-ISSN: 2338-1604 dan E-ISSN: 2407-8751* Volume 3 Nomor 3, Desember 2015, 163-174 <http://dx.doi.org/10.14710/jwl.3.3.163-174>. Journal Homepage:<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jwl> (Diakses 15 Desember 2022)
- Setyawan, W.B., Edi Kusmanto, M. Hasanuddin, Rahmi Y. Lutan, Sri Kusdi Rahayuningsih dan Muhajirin, 2015. *Mengelola Kawasan Pesisir Yang Tererosi Secara Terpadu*. Pusat Penelitian oseanografi LIPI, Jakarta.
- Yudo, S., & Hernaningsih, T., 2006. Kebutuhan Air Bersih masyarakat di Daerah perdesaan Nelayan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. *Jurnal Air Indonesia*. DOI: [10.29122/jai.v2i2.2302](https://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JAI/article/view/2302/1920). <https://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JAI/article/view/2302/1920> (Diakses 12 Oktober 2022)
- Yunita, E., Pargito, & Sinaga, R. M., 2018. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Pantai Labuhan Jukung Krui Pasca Terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. *Studi Sosial* 6 No. 1. <https://core.ac.uk/reader/296264520> (Diakses 24 Oktober 2022)